

**EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DESA SAMBIREJO
TIMUR KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar S 1 dalam
bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Oleh:

**KHAIRIYA HAZA HARAHAHAP
NPM : 10.851.0041**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
SUMATERA UTARA
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DESA SAMBIREJO
TIMUR KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
persyaratan guna memperoleh gelar S 1 dalam
bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Oleh:

KHAIRIYA HAZA HARAHAAP
NPM : 10.851.0041

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. USMAN TARIGAN, MS.

Drs.M.ASWIN HASIBUAN, MAP.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
SUMATERA UTARA
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/11/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repositorv.uma.ac.id)14/11/24

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DESA SAMBIREJO TIMUR KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

Nama Mahasiswa : **KHAIRIYA HAZA HARAHAHAP**

No. Stambuk : **10.851.0041**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. USMAN TARIGAN, MS.

Drs.M.ASWIN HASIBUAN, MAP.

DEKAN



Drs. AMIR PURBA, MA., Ph.D.

ABSTRAK

EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DESA SAMBIREJO TIMUR KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang lebih dikenal dengan istilah Musrenbangdes merupakan forum musyawarah tahunan yang diselenggarakan desa sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat sampai level terendah. Prinsip partisipatif dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diterjemahkan sebagai pelibatan masyarakat dalam semua tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sehingga menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan berpihak kepada kelompok miskin. Proses perencanaan yang partisipatif diharapkan dapat mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan.

Penelitian ini mencoba membahas tentang sejauh mana keberhasilan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa Sambirejo Timur, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari pelaksanaan musrenbang desa Sambirejo Timur, dan bagaimana evaluasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa Sambirejo Timur.

Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan faktor kerawanan yang mengancam kesejahteraan dan kerap terjadi di desa yaitu tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Dengan tujuan menekan faktor kerawanan dalam perencanaan, maka efek dari perencanaan pembangunan Desa akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam hal ini evaluasi yang dilakukan dalam musrenbang desa Sambirejo Timur dapat dikategorikan cukup baik. Akan tetapi dari segi infrastruktur dan kesediaan sarana dan prasarana lain seperti akses jalan protokol masih belum terlaksana dengan baik, sebab masih banyak ditemukan akses jalan yang mengalami rusak berat sehingga menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas. Padahal setiap kali musyawarah masalah ini selalu diusulkan, namun sampai saat ini usaha yang dilakukan masih belum maksimal.

Kata Kunci:

Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

ABSTRACT

The Village Development Planning Conference or better known as Musrenbangdes is an annual deliberation forum held by the village as an effort to involve the community at the lowest level. The participatory principle in implementing the Village Development Planning Deliberation (Musrenbangdes) is translated as involving the community in all stages of implementing the Village Development Planning Deliberation so as to produce a Development Work Plan (RKP) that truly reflects the needs of the community and is pro-poor. It is hoped that a participatory planning process can accelerate the process of realizing community welfare as a development goal.

This research tries to discuss the extent to which the implementation of the East Sambirejo village development planning deliberation was successful, how to improve community welfare from the implementation of the East Sambirejo village musrenbang, and how to evaluate the implementation of the East Sambirejo village development planning deliberation.

The evaluation is carried out by paying attention to vulnerability factors that threaten welfare and often occur in villages, namely high rates of poverty and unemployment, as well as low levels of health and education. With the aim of reducing vulnerability factors in planning, the effect of Village development planning will have a significant impact on improving community welfare. Village. In this case, the evaluation carried out in the East Sambirejo village musrenbang can be categorized as quite good. However, in terms of infrastructure and the availability of other facilities and infrastructure, such as protocol road access, it is still not implemented well, because there are still many road accesses that are seriously damaged, making it difficult for people to carry out their activities. Even though every time there is a deliberation on this issue, it is always proposed, but to date the efforts made are still not optimal.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai sorma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Khairiya Haza Harahap
108510041

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khairiya Haza Harahap

NPM : 108510041

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Isipol

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Manufaktur *Burner* Mesin *Stirling* mCHPSE-012021”

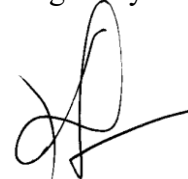
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis?pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :

Pada Tanggal : 2015

Yang menyatakan



(Khairiya Haza Harahap)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalmualaikum Wr.Wb

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkap tugas – tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu ~~Administrasi Negara~~ ^{Pemerintahan} untuk memperoleh gelar keserjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah “EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DESA SAMBIREJO TIMUR KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG “.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak tersebut, terutama kepada :

1. Kepada kedua Orangtua saya tercinta Ayahanda Parlindungan Harahap dan Ibunda Hartati yang tidak pernah terlambat memenuhi kebutuhan – kebutuhan penulis, sejak penulis menginjakkan kaki di jenjang Sekolah Dasar sampai

- jenjang Perguruan Tinggi hingga gelar Sarjana, dan tidak hentinya juga memberikan kasih sayang, serta nasehat, pendidikan moral, motivasi dan semangat, serta Do'a untuk Anaknya tercinta saya sendiri sebagai penulis dan peneliti dalam Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H.A Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
 3. Bapak ~~Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si~~ selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
 4. Bapak Drs. Usman Tarigan, M.S selaku Pembimbing I Skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan saran dan arahan kepada peneliti dalam setiap bimbingan yang telah dilakukan.
 5. Bapak Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP selaku Pembimbing II skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan saran serta masukan kepada peneliti dalam setiap bimbingan yang telah dilakukan.
 6. Seluruh Bapak / Ibu Dosen dan Staf Program Studi Ilmu ~~Hum~~ Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
 7. Kepada adik saya tercinta Siti Rohaya Harahap yang selalu memberikan semangat dan setia membantu dalam setiap kendala – kendala yang di hadapi oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT, sehingga kendala – kendala yang dihadapi tersebut dapat teratasi.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan – kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun demi kemajuan Ilmu Pengetahuan. Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2014

Penulis



KHAIRIYA HAZA HARAHAP
NPM : 10.851.0041

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Pembatasan Masalah.....	4
1.3 Perumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Kerangka Teori	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi Evaluasi	7
2.2 Pengertian Pelaksanaan	11
2.3 Pengertian Musyawarah	13
2.4 Definisi Perencanaan	14
2.5 Definisi Pembangunan	19
2.6 DefinisiPerencanaanpembangunan.....	20
2.7 Pengertian Desa	20
BAB III: METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.2 Teknik Pemilihan Informan	28
3.3 Metode Pengumpulan Data	28
3.4 Teknik Analisa Data	29
BAB IV: DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	30
4.2 Analisis Data Penelitian.....	42
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
BAB V : PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	57
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jarak Desa Sambirejo Timur dengan Pusat Pemerintahan.....	31
Tabel 2	Jarak Desa Sambirejo Timur dengan Tempat Strategis Lainnya.....	32
Tabel 3	Jumlah Penduduk Desa Sambirejo Timur berdasarkan agama yang dianut pada akhir tahun 2013.....	32
Tabel 4	Jumlah Penduduk Desa Sambirejo Timur berdasarkan Matapencaharian pada akhir tahun 2013.....	33
Tabel 5	Jumlah Rumah Ibadah di Desa Sambirejo Timur pada akhir tahun 2013.....	34
Tabel 6	Jumlah Sarana Kesehatan di Desa Sambirejo Timur pada akhir tahun 2013.....	35
Tabel 7	Jumlah Sarana/Gedung Pendidikan di Desa Sambirejo Timur pada akhir tahun 2013.....	35
Tabel 8	Jumlah Sarana Umum (Perekonomian, Perdagangan dan Telekomunikasi) di Desa Sambirejo Timur pada akhir tahun 2013.....	36
Tabel 9	Tingkat perkembangan pendidikan masyarakat desa Sambirejo Timur tahun 2012 – 2013.....	36
Tabel 10	Tingkat perkembangan kesehatan masyarakat desa Sambirejo Timur tahun 2012 – 2013.....	37
Tabel 11	Tingkat perkembangan ekonomi masyarakat desa Sambirejo Timur tahun 2012 – 2013.....	37
Tabel 12	Tingkat perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat desa Sambirejo Timur tahun 2012 – 2013.....	38
Tabel 13	Tingkat perkembangan pembangunan pemerintahan desa Sambirejo Timur.....	39
Tabel 14	Tingkat perkembangan pembangunan lembaga kemasyarakatan desa Sambirejo Timur.....	39
Tabel 15	Analisis data tingkat perkembangan pendidikan masyarakat desa Sambirejo Timur tahun 2012 – 2013.....	50
Tabel 16	Analisis data tingkat perkembangan kesehatan masyarakat desa Sambirejo Timur tahun 2012 – 2013.....	51
Tabel 17	Analisis data tingkat perkembangan ekonomi masyarakat desa Sambirejo Timur tahun 2012 – 2013.....	52
Tabel 18	Analisis data tingkat perkembangan keamanan dan ketertiban masyarakat desa Sambirejo Timur tahun 2012 – 2013.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : DAFTAR WAWANCARA
- Lampiran 2 : DAFTAR KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI DESA
SABIREJO TIMUR
- Lampiran 3 : DAFTAR HADIR MUSRENBANG DESA SAMBIREJO
TIMUR TAHUN 2013
- Lampiran 4 : PETA WILAYAH DESA SAMBIREJO TIMUR
- Lampiran 5 : DOKUMENTASI KANTOR KEPALA DESA SAMBIREJO
TIMUR KECAMATAN PERSUT SEI TUAN KABUPATEN
DELI SERDANG



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Perlu diakui bahwa bagi masyarakat, mengikuti proses musrenbang tidak selalu menjadi pengalaman yang kaya dan aspiratif. Di kebanyakan tempat, musrenbang seringkali hanya menjadi bagian ritual proses perencanaan yang memiliki makna yang sempit bagi warga setempat, bahkan dinilai tidak relevan lagi bagi kaum perempuan dan kelompok miskin. Padahal, musrenbang adalah satu metode *bottom-up* yang tidak dimiliki oleh setiap negara berkembang.

Manusia pada umumnya memiliki kepentingan yang berbeda – beda. Pada hakikatnya manusia juga memiliki sifat keserakahan yakni ingin berkuasa atau ingin menguasai apa yang ada di muka bumi ini. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang telah dimilikinya, selalu merasa kekurangan dengan apa yang telah diraihinya.

Seperti teori mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Maka untuk mengatasi permasalahan yang timbul antara sesama manusia dibentuklah yang namanya sebuah Negara yang di dalamnya terdapat peraturan yang harus di patuhi setiap warga negara. Dalam sebuah negara juga terdapat hak dan kewajiban setiap warga negara.

Dalam hal ini sebuah negara tidak dapat menjalankan roda pemerintahannya sendiri tanpa ada pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya yakni dengan pembagian daerah – daerah atau wilayah kekuasaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari negara Republik

Indonesia yakni mensejahterakan rakyat Indonesia. Untuk mempermudah suatu bangsa dalam mencapai tujuan khususnya di daerah terpencil atau pembagian wilayah maka perlu dibentuk sebuah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam mencapai suatu tujuan maka diperlukan kerja sama yang baik antara yang memimpin dan yang dipimpin, Maka begitu pula dalam sebuah desa.

Desa memiliki dua unsur yakni unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal sebuah desa memiliki tata kelola pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur pemerintahan desa, parlemen desa, lembaga – lembaga masyarakat dan unsur warga yang lebih luas. Sedangkan unsur eksternal desa meliputi kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang lebih dikenal dengan istilah Musrenbangdes merupakan forum musyawarah tahunan yang diselenggarakan desa sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat sampai level terendah. Prinsip partisipatif dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diterjemahkan sebagai pelibatan masyarakat dalam semua tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sehingga menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

yang benar – benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan berpihak kepada kelompok miskin. Proses perencanaan yang partisipatif diharapkan dapat mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan.

Tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa :

1. Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes);
2. Menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) maupun sumber pendanaan lainnya;

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dimana Perencanaan sendiri diartikan sebagai proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, pada konteks ini sumber daya yang dimaksud adalah potensi, kemampuan dan kondisi lokal, termasuk anggaran yang dikelola untuk dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka ditemukan berbagai masalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Namun, untuk lebih memfokuskan masalah yang sesungguhnya, maka penelitian ini hanya membatasi tentang; Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) pada Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tahun 2013.

1.3 Perumusan Masalah

Menyadari keterbatasan dalam upaya penulisan skripsi ini, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan pada desa mereka.

1. Sampai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa Sambirejo Timur.
2. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari pelaksanaan musrenbang desa Sambirejo Timur.
3. Evaluasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa Sambirejo Timur.

1.4 Tujuan Penelitian

Penulis mengadakan penelitian agar tujuan diatas dapat tercapai dengan baik, sehingga landasan yang riil dalam penulisan ini, serta untuk dapat diperincikan adalah sebagai berikut :

Untuk dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pada Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan program studi ilmu pemerintahan pada khususnya. Serta menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

Penelitian ini dapat bermanfaat kepada siapa saja yang memerlukannya terutama kepada calon kepala desa serta perangkat desa dan para pemangku kepentingan lainnya yang selanjutnya juga sebagai referensi kepada calon kepala desa untuk dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan kepala desa saat ini, dan dengan mengetahui hal tersebut dapat memajukan desa yang di pimpinnya untuk kedepan agar pembangunan pada Desa tersebut dapat berjalan secara optimal sesuai dengan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pemerintah pada khususnya, terutama dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa pada Desa Sambirejo Timur Kecamatan percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.6 Kerangka Teori

Pada dasarnya penguraian kerangka teori dalam penulisan skripsi ini di dasarkan kepada manfaat bagaimana suatu desa terpencil dapat mensejahterakan rakyat nya dengan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya sudah di tentukan suatu proses kegiatan untuk menyelenggarakan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan agar dapat berjalan dengan baik.

Di sini dikemukakan teori yang berkenaan dengan topik yang menjadi permasalahan penelitian. Menurut *Manase Malo* bahwa yang di maksud dengan teori “Gambaran yang sistematis itu di jabarkan dengan menghubungkan suatu konsep dengan konsep yang lainnya yang bertujuan menjelaskan suatu gejala tertentu”.

Maka teori dapat di artikan sebagai serangkaian konsep dalam bentuk proporsi (suatu pernyataan yang terdiri dari satu atau lebih konsep atau variabel) yang saling berkaitan, yang memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu gejala.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Termasuk di dalamnya langkah evaluasi yaitu: Persiapan (Perencanaan), Pelaksanaan, pengolahan hasil.

Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan menurut pengertian istilah "evaluasi" merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

Menurut *Worthen* dan *Sanders* evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (*worth*). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula.

Ada beberapa unsur yang terdapat dalam evaluasi yaitu :

1. Adanya sebuah proses (process)
2. Perolehan (obtaining)
3. Penggambaran (delineating)
4. Penyediaan (providing)
5. Informasi yang berguna (useful information)
6. dan alternatif keputusan

Sedangkan *Rooijackers Ad* mendefinisikan evaluasi sebagai setiap usaha atau proses dalam menentukan nilai. Secara khusus evaluasi atau penilaian juga diartikan sebagai proses pemberian nilai berdasarkan data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan.

Dan menurut *Anne Anasasi (1978)* mengartikan evaluasi sebagai *systematic process of determining the extent to which instructional objective are achieved by pupils*. Evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.

Sedangkan tujuan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghimpun data dan informasi yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai taraf perkembangan atau kemajuan yang di alami warga setempat.
2. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan tidak keberhasilan dalam suatu program, sehingga dapat di cari dan di temukan jalan keluar atau cara-cara perbaikannya. Jadi evaluasi harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi juga bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutupi kekurangan.

Sementara itu, model-model evaluasi dapat dibagi dalam beberapa bagian yakni:

1. Model CHIP (context.input.process.product)

Evaluasi konteks (context) di maksud untuk menilai kebutuhan, masalah, asset, dan peluang guna membantu pembuat kebijakan menetapkan tujuan dan prioritas. Serta membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui tujuan, peluang dan hasilnya.

Evaluasi masukan (input) dilaksanakan untuk menilai alternative pendekatan, rencana tindak, rencana staf, dan pembiayaan bagi kelangsungan program dalam memenuhi kebutuhan kelompok sasaran serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi berguna bagi pembuat kebijakan untuk memilih rancangan, bentuk pembiayaan, alokasi sumber daya, pelaksanaan dan jadwal kegiatan yang sesuai bagi kelangsungan program.

Evaluasi proses (process) ditujukan untuk menilai implementasi dari rencana yang telah ditetapkan guna membantu para pelaksana dalam menjalankan kegiatan dan kemudian akan dapat membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui program kerja dan memperkirakan hasilnya.

Evaluasi hasil (product) dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menilai hasil yang di capai yang diharapkan dan tidak diharapkan, jangka pendek dan jangka panjang, baik bagi pelaksana kegiatan agar dapat memfokuskan diri dalam mencapai sasaran program maupun bagi pengguna lainnya dalam menghimpun upaya untuk memenuhi kebutuhan kelompok sasaran.

2. Model kesenjangan

Evaluasi model kesenjangan adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku (*standar*) yang sudah ditentukan dalam program dengan kinerja (*performance*) sesungguhnya dari program tersebut.

- a. Kesenjangan antara-rencana dengan pelaksanaan program
- b. Kesenjangan antara yang diduga akan diperoleh dengan yang benar-benar direalisasikan.
- c. Kesenjangan antara status kemampuan dengan standar kemampuan yang ditentukan.
- d. Kesenjangan tujuan
- e. Kesenjangan mengenai bagian program yang dapat di ubah.

Kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. Oleh karena itu model evaluasi memiliki lima tahap yaitu desain, instalasi, proses, produk dan membandingkan.

3. Model evaluasi formatif

Tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk mengadakan penyesuaian didalam kegiatan begitu muncul kebutuhan, entah penyesuaian tersebut berkaitan dengan personal, materi, fasilitas atau berkaitan dengan objektif pembelajaran, atau bahkan dengan sikap diri sendiri.

4. Model evaluasi sumatif (hasil)

Tujuan dari evaluasi sumatif adalah menentukan efek atau hasil dari upaya pengajaran. Tujuannya adalah menjumlahkan apa yang terjadi sebagai hasil dari pembelajaran tersebut.

5. Model pengukuran

Pengukuran menurut model ini tidak dapat dilepaskan dari pengertian kuantitas atau jumlah. Jumlah ini akan menentukan besarnya objek, orang ataupun peristiwa-peristiwa yang dilukiskan dalam unit-unit ukuran tertentu. Dalam model ini telah diterapkan dalam proses evaluasi untuk melihat dan mengungkapkan perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok dalam hal kemampuan, minat, sikap maupun kepribadian.

6. Model persesuaian

Menurut model ini evaluasi tidak lain adalah usaha untuk memeriksa persesuaian antara tujuan-tujuan yang diinginkan dari hasil belajar yang telah dicapai. Hasil dari evaluasi yang diperoleh berguna bagi kepentingan penyempurnaan program, bimbingan, dan pemberian informasi kepada pihak pihak luar mengenai hasil-hasil yang telah dicapai.

7. Model evaluasi sistem

Evaluasi menurut model ini dimaksudkan untuk membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program yang dikembangkan dengan sejumlah kriteria tertentu untuk akhirnya sampai pada suatu deskripsi mengenai program yang dinilai tersebut.

2.2 Pengertian Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut *westa* (1985 : 17) pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melakukan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala

kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Pengertian pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah (1987 : 5) bahwa pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan :

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang di sampaikan.
2. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhnya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggungjawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana implementer program.
4. Struktur birokrasi, yaitu yang mengatur tata aliran pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Keempat faktor di atas, di pandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan, namun juga ada keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lain. Selain itu dalam proses pelaksanaan terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak menurut abdullah (1987 : 398) yaitu :

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan.
3. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.

2.3 Pengertian Musyawarah

Musyawarah adalah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian.

Saat ini musyawarah selalu dikait-kaitkan dengan dunia politik, demokrasi. Bahkan hal tersebut tidak dapat di pisahkan, pada prinsipnya

musyawarah adalah bagian dari demokrasi, dalam demokrasi pancasila penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan jika terjadi kebuntuan yang berkepanjangan barulah dilakukan pemungutan suara, jadi demokrasi tidak lah sama dengan votting. Cara votting cenderung dipilih oleh sebagian besar negara demokrasi karena lebih praktis, menghemat waktu dan lebih simpel dari pada musyawarah yang berbelit-belit itulah sebabnya votting cenderung identik dengan demokrasi padahal votting sebenarnya adalah salah satu cara dalam mekanisme penentuan pendapat dalam sistem demokrasi.

Musyawarah adalah suatu proses melakukan pembahasan terhadap masalah tertentu yang di hadapin oleh sekelompok orang. Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai keputusan yang dapat berpengaruh bagi kepentingan bersama. selain memberikan dampak positif, pelaksanaan musyawarah memiliki manfaat.

Dapat membantu orang banyak dalam menyikapi berbagai macam pendapat dari orang lain dalam memecahkan masalah yang sedang menjadi pokok bahasan. Bisa mengurangi pertikaian atau perselisihan pendapat yang sangat dimungkin terjadi karena setiap peserta musyawarah bisa saja memiliki kepentingan yang berbeda. Hal ini wajar karena pemikiran setiap orang tidaklah sama.

Bisa mengurangi hingga menghindari adanya konflik yang berkepanjangan pada suatu masalah karena masing-masing pihak yang berkaitan dengan suatu masalah bisa mendapatkan solusi yang terbaik.

2.4 Definisi Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir. Apabila sebuah rencana telah ditetapkan, maka dokumen menyangkut perencanaan terkait harus diimplementasikan perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa – apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.

Perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa datang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan – keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program.

Definisi lain dari perencanaan adalah pemikiran hari depan. perencanaan berarti pengelolaan, pembuat keputusan, suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata, dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi.

Ciri – ciri pokok dari perencanaan :

1. Identifikasi persoalan.
2. Perumusan tujuan umum dan sasaran khusus hingga target – target yang kuantitatif.
3. Proyeksi keadaan di masa akan datang.
4. Pencarian dan penilaian berbagai alternative.
5. Penyusunan rencana terpilih.

1. Beberapa Arti Perencanaan Menurut Para Ahli :

- a. Garth N. Jone, Perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan pengembangan dari pada tindakan yang paling baik untuk pencapaian tugas.
- b. M. Farland, Perencanaan adalah suatu fungsi dimana pimpinan kemungkinan menggunakan sebagian pengaruhnya untuk mengubah dari pada wewenangnya.
- c. Abdulrachman (1973), Perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian.
- d. Siagian (1994), Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.
- e. Terry (1975), Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang di yakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu.
- f. Kusmiadi (1995), Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapaiannya.
- g. Soekartawi (2000), Perencanaan adalah pemilihan alternative atau pengalokasian berbagai sumberdaya yang tersedia.

2. Langkah – Langkah Dalam Penyusunan Perencanaan

Penetapan tujuan awal organisasi merupakan bagian awal dari proses penyusunan perencanaan. Tujuan organisasi ibarat kompas yang dijadikan arah bagi keputusan dan aktivitas organisasi. Perumusan tujuan harus dibuat sejelas mungkin dan sedapat mungkin bersifat kuantitatif. Sedangkan perumusan tujuan yang bersifat kualitatif memiliki kecenderungan dalam salah tafsir dari berbagai pihak atau dapat menimbulkan salah persepsi sehingga memberi kesan adanya pelanggaran di dalam pencapaian tujuan organisasi. Tanpa perumusan tujuan organisasi yang tegas dan jelas maka organisasi akan menghamburkan sumber daya secara berlebihan. Mengenal prioritas akan kekhasan tujuan organisasi akan membuat manajemen dapat menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.

Perumusan organisasi sangat penting baik bagi perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Perumusan tujuan organisasi merupakan prioritas pertama atau kedua, dikarenakan penetapan tujuan organisasi merupakan langkah pertama yang sangat esensial di dalam perencanaan, maka pemimpin/manajer harus dapat membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Kegagalan atau tidak merumuskan tujuan organisasi disebabkan :

Dalam arti luas, perencanaan merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian. Dan, perencanaan yang ideal adalah langkah-langkah yang dilakukan manusia agar kepastian semakin dekat dalam kehidupan manusia. Perencanaan dalam arti luas telah dilakukan manusia sejak masa purbakala. Kemajuan peradaban manusia di tentukan oleh kemampuan perencanaan ini. Langkah perencanaan adalah memfungsikan kemampuan “melihat jauh ke

depan”. Kemampuan “ melihat jauh ke depan” manusia terbukti telah membawa manusia menuju peradaban seperti yang kita alami sekarang.

Dalam arti sempit, sesungguhnya merupakan derivat dari kemampuan foresight itu, yaitu kemampuan “mengukur”(measuring). Persoalannya adalah bahwa tidak semua “ sesuatu” itu bersifat materi, sehingga sifatnya “tersembunyi”, sehingga sulit di ukur. Di sinilah sesungguhnya tugas perencana, yaitu “mendefinisikan” sesuatu yang “tersembunyi” menjadi terukur sehingga menjadi “nyata”.

Sedangkan arti dan fungsi perencanaan itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan dalam arti seluas – luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik – baik nya dengan sumber – sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
- c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan di capai atau yang akan dilakukan bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.
- d. Perencanaan adalah melihat ke depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.
- e. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber – sumber pembangunan yang terbatas adanya.

Inilah tugas perencana, Bagaimana perencana menuntaskan tugasnya. Dengan adanya beberapa jenis perencanaan, perencana dapat memilih yang ideal, di antaranya :

- a. Perencanaan menurut jangka waktu
- b. Perencanaan menurut sifat dorongannya
- c. Perencanaan menurut alokasi sumber daya
- d. Perencanaan menurut tingkat keluwesan
- e. Perencanaan menurut sistem ekonomi
- f. Perencanaan menurut arus informasi
- g. Perencanaan menurut dimensi pendekatan, dan
- h. Perencanaan menurut lingkaran aktivitas pembangunan.

2.5 Definisi Pembangunan

Pengertian pembangunan adalah proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Dan perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adalah kata yang digunakan secara meluas dalam semua media massa di seluruh dunia dan merupakan konsep yang kerap kali disebut dan diperbincangkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama di kalangan ahli politik, wartawan, orang pemerintahan, dll. Pembangunan itu sendiri berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi syarat utama pembangunan.

Secara definitif pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. sistem pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang di laksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Sedangkan pembangunan memiliki beberapa tujuan utama, yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2. Memenuhi kebutuhan dasar ekonomi, pendidikan, dan kesehatan
3. Memperbaiki tata kelola pemerintahan
4. Memberdayakan masyarakat berbudaya, berkeadilan, dan berwawasan tinggi.
5. memperluas lapangan kerja
6. Menciptakan masyarakat yang sejahtera

2.6 Defenisi Perencanaan Pembangunan

Pembangunan dan perencanan ibarat jiwa dan raga seorang manusia. Jiwa yang sesehat apa pun tidak dapat menggerakkan raga yang tidak sempurna atau tidak sehat. Sebaliknya, raga yang sempurna atau sehat tidak dapat bekerja efektif apabila jiwa-nya tidak sehat. Jiwa yang sehat dan raga yang sempurna adalah syarat agar seorang manusia bekerja efektif. Demikianlah jika kita melihat hubungan antara pembangunan dan perencanaan. Keduanya harus berada dalam keseimbangan apabila suatu perencanaan pembangunan ingin efektif mencapai hasil yang di idamkan.

Sistem perencanaan pembangunan mengajarkan kepada para perencana bagaimana memahami perencanaan yang baik. Namun ada yang juga bersifat hakiki, yaitu pemahaman akan konsep pembangunannya. Oleh karena itu, memahami dan melaksanakan sistem perencanaan pembangunan akan lebih sempurna apabila para perencana memahami konsep pembangunan yang di idealkan.

yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Panitia pemilihan melaksanakan pemilihan dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai persyaratan. Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan.

Calon kepala desa yang dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Panitia pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Calon Kepala Desa Terpilih sebagai mana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.

Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih. Pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati / Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati / Wali kota.

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6(enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya .

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 di sebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan atau hak yang luas dalam mengatur wilayahnya, seperti kita ketahui bahwa desa bukanlah bawahan dari kecamatan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten kota. Sedangkan desa bukan bagian dari perangkat daerah.

Desa memiliki Kewenangan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten kota yang di serahkan pengaturannya kepala desa yakni urusan pemerintahan secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kotadan urusan pemerintahan lainnya di serahkan kepada desa.

PEMERINTAHAN DESA

Pada dasarnya desa memiliki pemerintahan sendiri. Dalam sebuah desa memiliki perangkat desa yang meliputi :

1. Kepala Desa

Dalam melaksanakan suatu roda pemerintahan, suatu Negara tidak dapat melaksanakan roda pemerintahannya tanpa di dukung oleh birokrasi yang memiliki kredibilitas yang memadai dalam memimpin sebuah instansi pemerintah dalam menjalankan suatu kewenangan yang telah di berikan.

Kepala desa merupakan pemimpin yang mampu mensejahterakan warganya melalui sistem kepemimpinan yang di lakukan dalam meningkatkan

kesejahteraan warganya baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Seorang kepala desa harus mampu mengatasi atau memberikan solusi setiap permasalahan yang terjadi di ruang lingkup desa yang dipimpinnya. Seorang kepala desa harus mampu bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul dan mampu mengayomi dan mengajak warganya untuk mematuhi peraturan pemerintahan yang ada sesuai dengan undang – undang yang berlaku di Indonesia.

Seorang kepala desa harus menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun fungsi Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin menyelenggarakan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk di bahas dan di tetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina perekonomian desa
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

2. Sekretaris Desa

Seorang sekretaris desa memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung berjalannya roda pemerintahan dalam sebuah desa. Tugas pokok dan fungsi sekretaris desa meliputi :

a. Tugas

1. Membantu kepala desa di bidang administrasi umum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah desa.
2. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan hadir.
3. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa di berhentikan sementara.
4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

b. Fungsi

1. Perencanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
2. Pengkoordinasian kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya

3. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)

Lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong royong.

Pengurus LKMD umumnya tokoh masyarakat setempat, Pembentukan LKMD disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan musyawarah anggota masyarakat.

Fungsi LKMD adalah membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. Selain itu, LKMD memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa.

4. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Badan permusyawaratan desa (BPD) dan kepala desa mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

a. Badan permusyawaratan desa memiliki tugas

1. Membahas rancangan peraturan desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Menyusun tata tertib BPD

b. Hak

1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
2. Menyatakan pendapat

c. Kewajiban

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan perundang – undangan

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
4. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
5. Memproses pemilihan kepala desa
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
7. Menghormati nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

4. PKK (Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga)

Pembinaan dan kesejahteraan keluarga (pkk) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

PKK bertujuan untuk memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera, baik di pedesaan mauoun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana metode penelitian kualitatif disebut juga metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Dan pada dasar nya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Dengan penelitian ini peneliti dapat merasakan dan mencoba melihat langsung dari sudut pandang tentang sisi baik buruk nya musrenbangdes di tempat yang akan peneliti tuju yaitu di desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang.

3.2 Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *homogeneous sampling*, dimana informan terdiri atas individu-individu dengan satu karakteristik. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah kepala desa, tokoh masyarakat, dan para pemangku kepentingan desa sambirejo timur.

3.3 Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan.

Pengumpulan data dapat di lakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila di lihat dari sumber data nya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, termasuk dokumentasi, pengamatan, interview, dan kuisisioner. dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misal nya lewat orang lain atau dokumen. Selanjutnya bila di lihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat di lakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuisisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

3.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa dapat dilakukan dengan cara mengadakan interprestasi data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi serta penyebaran angket. Dari hasil pekerjaan yang di sebutkan maka berdasarkan teori-teori yang ada sangkut pautnya dengan pembahasan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dalam bab – bab terdahulu telah diuraikan materi tentang permasalahan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya pada bagian ini diuraikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, yakni :

1. Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Termasuk di dalamnya langkah evaluasi yaitu: Persiapan (Perencanaan), Pelaksanaan, pengolahan hasil yang pada akhirnya tercapai suatu tujuan yang diinginkan.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang lebih dikenal dengan istilah Musrenbangdes merupakan forum musyawarah tahunan yang diselenggarakan desa sebagai upaya untuk melibatkan masyarakat sampai level terendah. Prinsip partisipatif dalam pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) diterjemahkan sebagai pelibatan masyarakat dalam semua tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sehingga menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan berpihak kepada kelompok miskin. Proses perencanaan yang

partisipatif diharapkan dapat mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan.

3. Pelaksanaan musrenbang desa Sambirejo Timur di lakukan setiap tanggal 22 Januari dan di laksanakan di aula Kantor Desa. Sedangkan proses pelaksanaan musrenbang yaitu langsung dikoordinir oleh Kepala Desa sebagai penanggung jawab dengan menetapkan tim fasilitator musrenbang desa yang terdiri dari BPD, LKMD dan aparat-pemerintah desa lainnya. Adapun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang di hadiri oleh masyarakat desa Sambirejo Timur yaitu sebanyak 60 orang yang terdiri dari; unsur PKK sebanyak 10 orang, unsur BPD sebanyak 7 orang, Kepala Dusun sebanyak 11 orang, Staf Desa sebanyak 6 orang, unsur BKM sebanyak 5 orang, dan Tokoh MasyarakatDesa Sambirejo Timur sebanyak 21 orang.
4. Dalam menyusun rencana pembangunan Desa. Kepala Desa menyarankan, upaya review (evaluasi) dilakukan dengan memperhatikan faktor kerawanan yang mengancam kesejahteraan dan kerap terjadi di desa yaitu tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Dengan tujuan menekan faktor kerawanan dalam perencanaan, maka efek dari perencanaan pembangunan Desa akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam hal ini evaluasi yang dilakukan dalam musrenbang desa Sambirejo Timur dapat dikategorikan cukup baik. Akan tetapi dari segi infrastruktur dan kesediaan sarana dan prasarana lain seperti akses jalan protokol masih belum terlaksana dengan baik, sebab masih banyak ditemukan akses jalan yang mengalami

rusak berat sehingga menyulitkan masyarakat untuk beraktivitas. Padahal setiap kali musyawarah masalah ini selalu diusulkan, namun sampai saat ini usaha yang dilakukan masih belum maksimal.

5. Evaluasi pelaksanaan musrenbang menurut yang saya lihat sangat lah baik di karenakan dengan adanya musrenbang memudahkan masyarakat untuk mengajukan pendapatnya agar pembangunan desa sambirejo timur dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

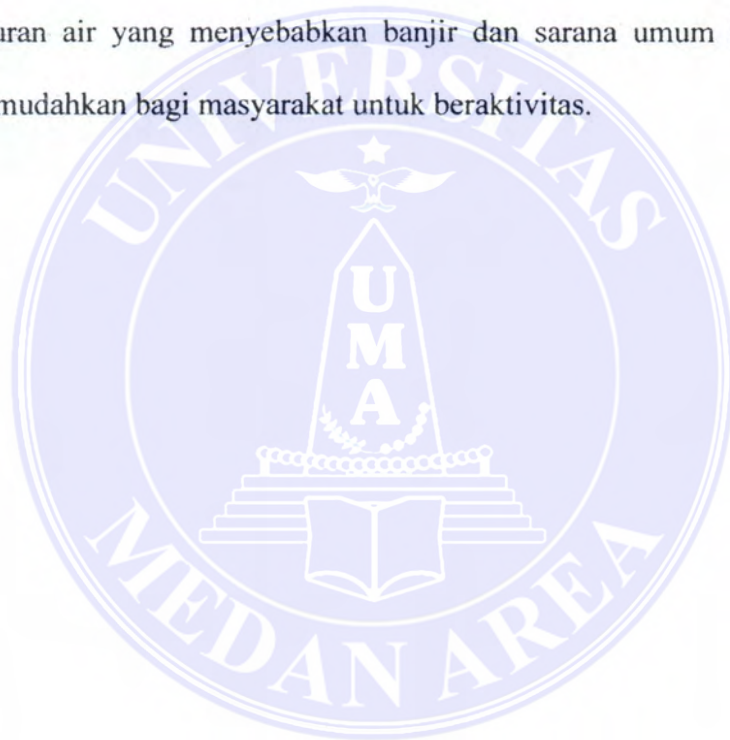
5.1. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Perlu adanya pelaksanaan musrenbangdes yang konsisten dan berkelanjutan serta yang terpenting adalah dilakukan dengan cara yang serius dan tidak terkesan formalitas belaka. Hal ini diharapkan agar dapat berjalan dengan baik dan meningkat setiap tahunnya serta memunculkan hal-hal dan ide-ide yang baru lagi untuk kemajuan desa Sambirejo Timur di masa mendatang.
2. Perlu adanya usaha yang lebih serius lagi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sambirejo Timur beserta jajarannya dan bekerja sama dengan BPD serta unsur-unsur lainnya dalam meningkatkan pembangunan desa, terutama pembangunan fasilitas umum, seperti akses jalan yang baik, saluran air, dan sarana umum lainnya, sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktivitas.
3. Perlu adanya penanaman nilai-nilai persatuan dan kesatuan terhadap masyarakat desa Sambirejo Timur sehingga memunculkan sikap kebersamaan

dan rasa saling memiliki yang akhirnya akan memunculkan sikap gotong royong dan saling tolong menolong demi kemaslahatan dan kemajuan pembangunan desa Sambirejo Timur.

4. Seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Sambirejo Timur yaitu dengan cara ikut serta dan andil dalam pelaksanaan musrenbangdes mengambil saran dan masukan yang penting yang di usulkan setiap musyawarah, terutama pembangunan fasilitas umum seperti perbaikan jalan, saluran air yang menyebabkan banjir dan sarana umum lainnya, sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk beraktivitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro, Tjokoroamidjojo, 1974. Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta: PT. Auud.
- Coralie, Brayant, & Louise G. White, -1987. Manajemen Pembangunan, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Dr.Riant, Nugroho & Randy, R.Wrihatnolo, 2011. Manajemen Perencanaan Pembangunan, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Drs.Miftah, Thoha.MPA, 1990. Perilaku Organisasi Konsep dasar & Aplikasinya, Jakarta: CV.Rajawali.
- Drs.Sutarto, 1989. Dasar-dasar Organisasi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Durachaman, Budi, dkk, 2006. Himpunan Peraturan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemerintahan Desa, Bandung: Fokusmedia.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1985. Organisasi Jilid 2, Jakarta: PT. Gelora aksara Pratama.
- Prof.Bintoro, Tjokoroamidjojo M.A, 1989. Perencanaan Pembangunan, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo.
- Prof.Dr. Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- R.Binarto, 1983. Interaksi Desa, Kota dan Permasalahannya, Gahlia Indonesia
- Riant, Nugroho D, 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi & Evaluasi, Jakarta: Kelompok Gramedia.
- Rianingsih, Djohani, 2008. Panduan Penyelenggaraan Musrenbangdes, Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta
- Pengertian Pelaksanaan.<http://id.Wikipedia.org/wiki/pelaksanaan#Definisi>
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, <http://www.bpkp.go.id>

Lampiran

DAFTAR WAWANCARA

Teks wawancara terhadap salah satu pegawai pada tanggal 10 juni 2014 yang bernama WARSINI, SH :

1. Apakah ada kesulitan dalam proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Sambirejo Timur ?

Jawaban : proses perencanaan pembangunan desa sambirejo timur tidak lah sulit dan berjalan dengan aman dan baik tapi kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti proses musrenbangdes mengakibatkan kurangnya usulan-usulan atau saran yang dapat masuk yang di ajukan masyarakat yang tidak mengikuti proses musyawarah perencanaan pembangunan desa.

2. Saran-saran apa sajakah yang di setuju atau yang di usulkan setiap musyawarah?

Jawaban : saran-sarannya yaitu seperti perbaikan jalan, saluran air agar tidak menyebabkan banjir dan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan tepat dalam waktu yang tidak lama.

3. Apa saja yang sudah terealisasi dan yang belum terealisasi?

Jawaban : yang sudah terealisasi yaitu pengaspalan rabat beton atau setiap gang atau jalan kecil, yang belum terealisasi yaitu pengaspalan jalan utama yaitu jalan protokol (rusak berat).

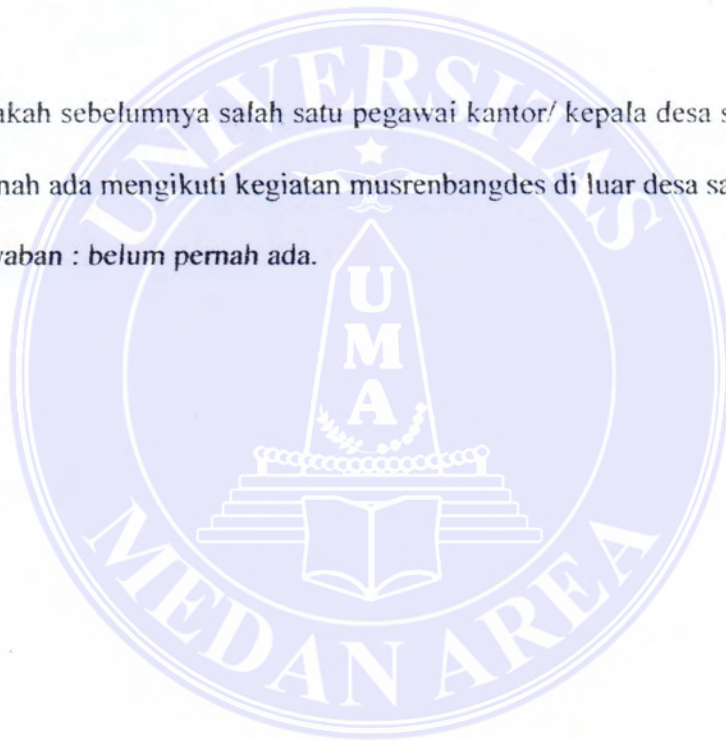
Lampiran

4. Apa penyebab dan upaya yang di lakukan agar pembangunan jalan dapat terealisasi?

Jawaban : sebabnya yaitu belum adanya turun dari Pemda (Pemerintah Daerah) dan upaya yang di lakukan setiap tahun yaitu di usulkan setiap kali musyawarah agar menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangun di tahun berikutnya.

5. Apakah sebelumnya salah satu pegawai kantor/ kepala desa sambirejo timur ini pernah ada mengikuti kegiatan musrenbangdes di luar desa sambirejo timur?

Jawaban : belum pernah ada.



Lampiran

DAFTAR KEBERHASILAN YANG TELAH DICAPAI

Adapun keberhasilan yang telah di capai desa Sambirejo Timur yaitu sebagai berikut :

1. Juara II Lomba Desa Terbaik Tingkat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011.
2. Juara I Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012
3. Juara I Seleksi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Tingkat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011
4. Juara I Seleksi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011
5. Juara Nasional Seleksi Pekerja Sosial Masyarakat Berprestasi Tingkat Nasional
6. Juara III Kesatuan Gerak PKK KB KES 2011
7. Juara II Kesatuan Gerak PKK KB KES 2012
8. Juara I KB Tk. Kabupaten Deli Serdang
9. Juara I Lomba Pendataan Keluarga Tk Kabupaten Deli Serdang
10. Dicanangkannya Desa Sambirejo Timur sebagai Masyarakat Gemar Dengar Radio tingkat Provinsi Sumatera Utara oleh Kepala Stasiun RRI Pusattahun 2011
11. Juara II Desa Percontohan 10 Program PKK Tingkat Kabupaten Deli Serdang 2012
12. Juara I Lomba Kadarkum dari Menteri Hukum dan HAM RI tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012
13. Juara II lomba Desa Percontohan PKK Tk Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012
14. Juara I Lomba PKD RT Tk Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012

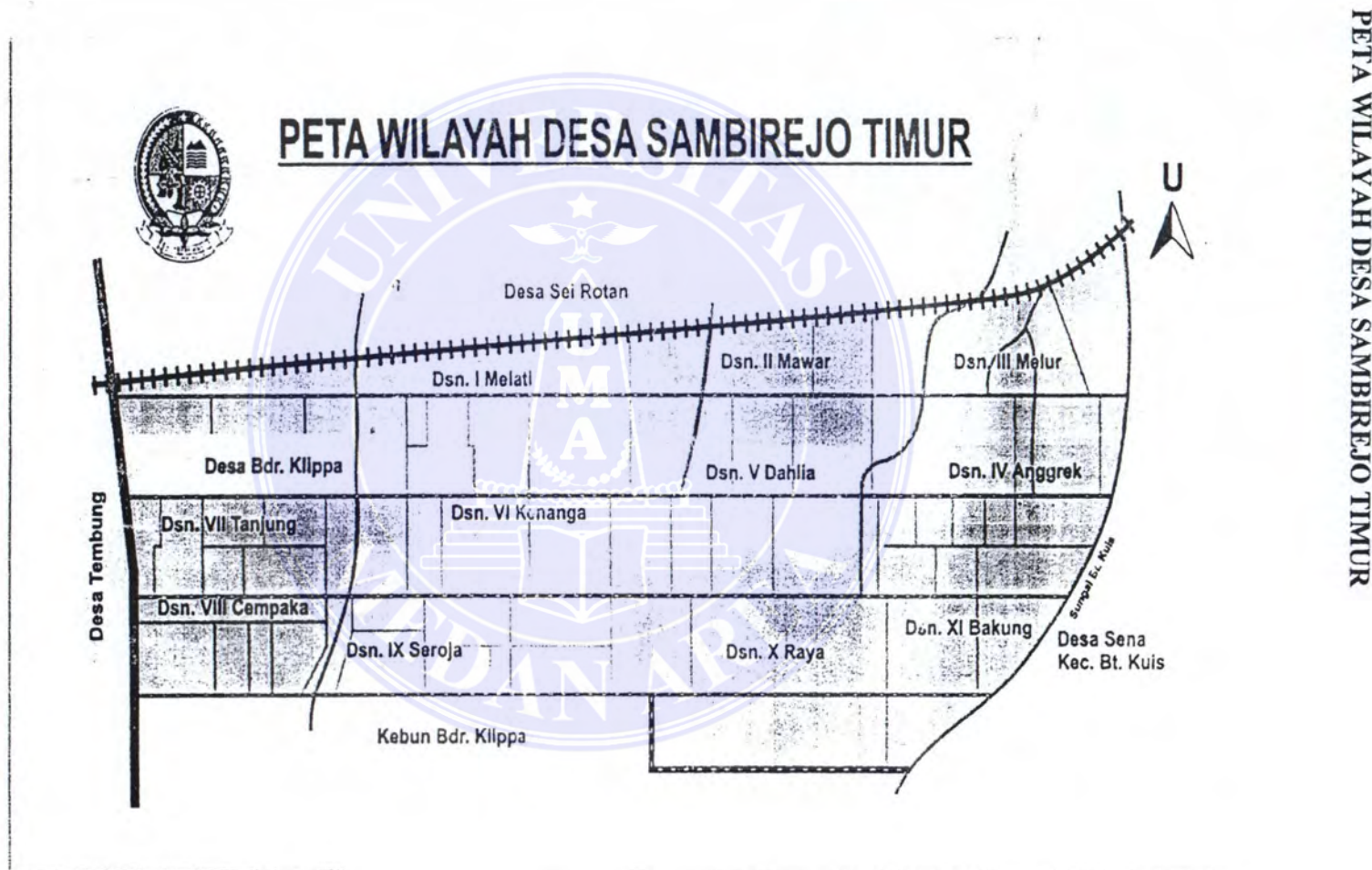
Lampiran

15. Menerima penghargaan “ Anubhawa Sasana Desa” Desa sadar Hukum dari menteri hokum dan HAM RI Tahun 2013
16. Gerakan Bersih desa rutin dilaksanakan setiap tahunnya hasil swadaya masyarakat dan sudah berjalan selama 33 tahun dari tahun 1980 s/d tahun 2013.



DAFTAR - HADIR
MUSYAWARAH DESA
TANGGAL 22 JANUARI 2014
AULA KANTOR DESA SAMBIREJO TIMUR

NO	NAMA	INSTANSI	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	LARUWATI	Pemerintah Desa	Kel. Sambirejo	[Signature]
2	Misdi		J. Mangun	[Signature]
3	TUKIRIN	KEP. DESA	DES. I	[Signature]
4	MISNO	DSN II MANGUN	DSN II MANGUN	[Signature]
5	SUHERMAN	DSN VI KAYU	DSN VI KAYU	[Signature]
6	Pujiono	KADUS.	DSN X	[Signature]
7	ZELAMAT Hamdoyo	KADUS VI	DSN III	[Signature]
8	MARLANI	PKK	DSN II	[Signature]
9	MISTIAJI	P. K. E.	DSN IV	[Signature]
10	NGADINEM	P. S. R.	DSN X	[Signature]
11	NI AWATI	ISTRI KADUS	DSN VI	[Signature]
12	STI Winarti	PKK	DSN IX	[Signature]
13	BATIA WATI Hary	B.K.M. KADUS	DSN I MELAT	[Signature]
14	Diana	Staf Desa	DSN IX	[Signature]
15	Musno	Kadus.	Desa I Paksi	[Signature]
16	Musdianto		Desa X	[Signature]
17	KINTORO	B.K.M.	DSN VII	[Signature]
18	Suhardoyo	BPD	Des. II Mangun	[Signature]
19	Rukhyadi	Pengurus Desa	- " -	[Signature]
20	Totomins Fat	Kel. LKMO	SAMTIM	[Signature]
21	Samingun	KADUS XI	Samingun	[Signature]
22	MUNAR	KADUS VII	SAMTIM	[Signature]
23	ERWANTO	KADUS III	SAMTIM	[Signature]
24	LEGUNO	KADUS. IV	SAMTIM-DSN IV	[Signature]
25	Simi Sunito	MASPERAKAT	DSN V. DAHLIA	[Signature]
26	GAKUD RI	masperakat	DURUK RAYE	[Signature]
27	Sunsenti	masperakat	Dusun X Rango	[Signature]
28	Mrs. KASIM	masperakat	Pit. Sewan	[Signature]
29	Jenuri	Kadus. II	Des. II	[Signature]
30	Evi Wahyuni	Staf Desa	Des. I	[Signature]
31	SUWATI Satrio	BPD	Des. V	[Signature]
32	Hidayat	Masperakat	Dusun II	[Signature]
33	ALAMSyah Hamdoyo	B.P.D.	DSN VI	[Signature]

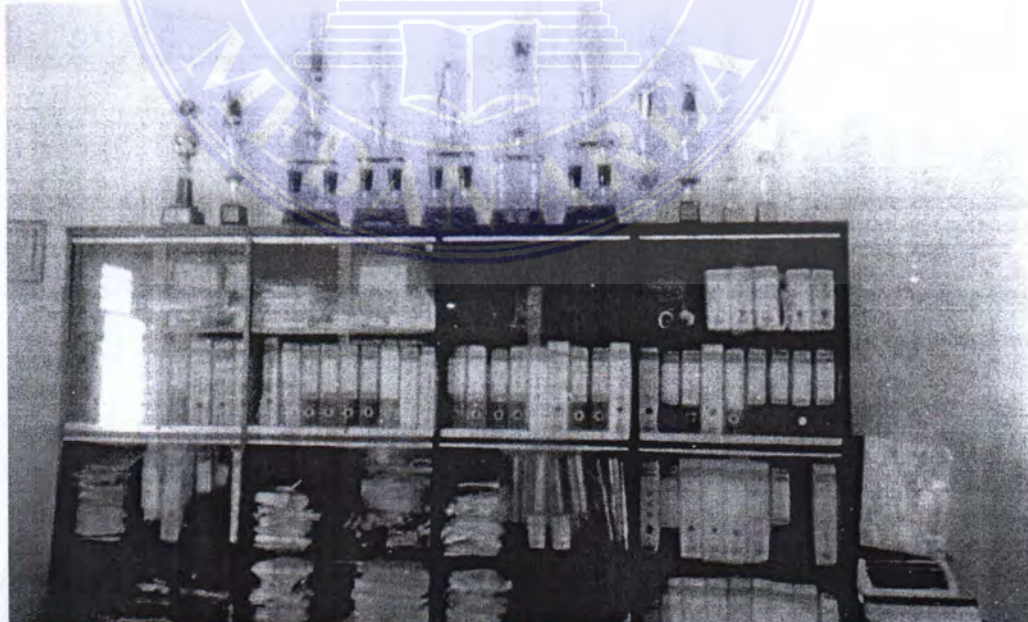


Lampiran

**DOKUMENTASI KANTOR KEPALA DESA SAMBIREJO TIMUR
KECAMATAN PERSUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG**

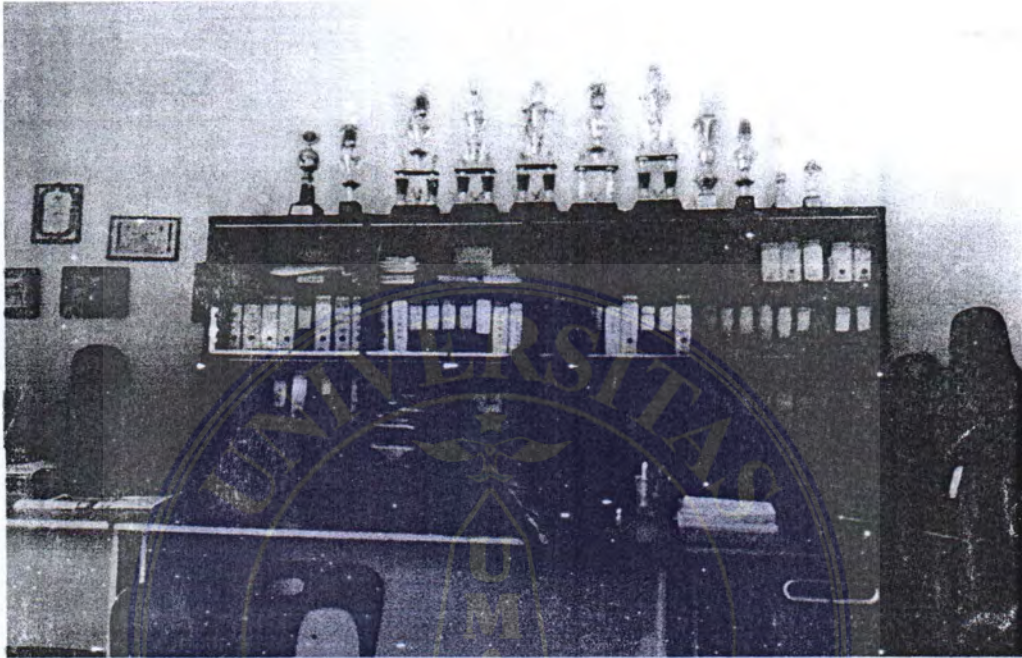


**Sumber : Ruangbagian umum kantor Kepala Desa Sambirejo Timur
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**



**Sumber : Ruangbagian umum kantor Kepala Desa Sambirejo Timur
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**

Lampiran



**Sumber : Ruang bagian umum kantor Kepala Desa Sambirejo Timur
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang**